

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jawa Barat merupakan salah satu sentra beras terbesar ketiga di Indonesia. Berdasarkan hasil survei KSA pada tahun (2022) luas panen padi mencapai sekitar 10,45 juta hektar atau mengalami kenaikan sebanyak 40,87 ribu hektar 0,39 persen dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 produksi padi yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2022 mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton 0,59 persen.

Rochaeni (2014) menyatakan bahwa pertanian berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Saat ini produksi tanaman pangan sedang menghadapi kesulitan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan produksi pertanian untuk mengatasi krisis pangan. Sektor pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun, pertanian juga merupakan sumber pendapatan bagi 50 persen penduduk. Pertanian juga merupakan sumber pendapatan ekspor, devisa serta mendorong dan menarik pertumbuhan sektor lain (Nainggolan, 2005).

Input pertanian yang meliputi pupuk, benih, mesin dan lain sebagainya. Input yang paling sering digunakan oleh petani salah satunya adalah pupuk, jumlah yang digunakan bisa mencapai beberapa ton dalam satu musim tanam. Hal ini menjadikan kebijakan subsidi pupuk sebagai langkah umum yang diterapkan Pemerintah untuk membantu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan petani. Penyediaan pupuk di lokasi yang tepat waktu akan berperan penting dalam mempengaruhi produktivitas dan pendapatan pertanian. Budidaya padi sangat bergantung pada pupuk anorganik, khususnya pupuk bersubsidi. Pemerintah juga berupaya untuk terus menyediakan pupuk yang diperlukan untuk meningkatkan produksi, khususnya pada padi, jagung, dan kedelai (Sri 2016).

Petani dalam memenuhi kebutuhan usahataniya tentu akan mendapatkan banyak dukungan apabila distribusi input dilakukan secara terbuka. Sebagai pihak yang paling berperan dalam mensejahterakan petani, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan terkait distribusi input pertanian kepada petani. Salah satu kebijakan tersebut adalah subsidi harga input pertanian, antara lain subsidi

pupuk, benih, mesin pertanian, dan suku bunga kredit (Betaria, 2019).

Pupuk menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam menunjang produksi padi. Menurut Suharno (2018) produksi padi merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengolahan lahan, penanaman, perawatan, dan panen padi untuk menghasilkan beras. Proses tersebut melibatkan penggunaan teknologi pertanian, input pertanian seperti pupuk dan benih unggul, serta manajemen irigasi yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Produksi padi menyangkut kepada ketersediaan pangan, Ketersediaan pangan adalah kondisi dimana jumlah dan jenis pangan yang cukup tersedia secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan program kebijakan fiskal yang dapat membantu terpenuhinya kebutuhan pupuk petani dengan mudah dan dengan harga terjangkau agar kesejahteraan petani meningkat.

Tabel 1 Hasil Produksi dan Produktivitas Tiap Kecamatan di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Hasil Produksi Padi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Kawalu	1.446	11.732	8,11
2.	Mangkubumi	1.438	13.558	9,43
3.	Bungursari	1.327	11.014	8,30
4.	Tamansari	953	8.004	8,40
5.	Purbaratu	818	6.912	8,45
6.	Cibeureum	790	6.932	8,77
7.	Indihiang	627	5.354	8,54
8.	Cipedes	482	3.356	6,96
9.	Tawang	111	873	7,68
10.	Cihideung	76	512	6,73
	TOTAL	8.108	68.247	81,37

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Tasikmalaya (2023)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Kawalu merupakan kecamatan dengan luas lahan terluas dan juga merupakan salah satu kecamatan yang aktif dalam transaksi subsidi pupuk. Alasan peneliti memilih lokasi di Kecamatan Kawalu dikarenakan daerah Kawalu mempunyai lahan terluas di Kota Tasikmalaya tetapi pada tahun 2023 mengalami permasalahan pada produktivitas dikarenakan dosis pupuk yang dikurangi oleh pemerintah dan hal tersebut diakibatkan karena adanya permasalahan pada sistem irigasi di Kecamatan Kawalu pada tahun 2023. Maka dari itu dapat diketahui bahwa Kecamatan Kawalu mempunyai peluang yang besar dibanding daerah yang lainnya, tentunya produktivitas padi yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus ikut serta dalam mendukung kemajuan pertanian di Indonesia. Persyaratan utama untuk mendapatkan kartu tani adalah petani harus tergabung dalam kelompok tani.

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2022)

Kartu Tani merupakan salah satu akses layanan perbankan yang terintegrasi dan berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, hingga kartu subsidi (*e-wallet*). Kartu tani menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dalam Pedoman Teknis Pengolahan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 merupakan alat penebusan pupuk bersubsidi kepada petani agar dapat menjamin tingkat transparansi dan akuntabilitasnya. Jumlah pupuk yang diterima oleh petani harus berdasarkandari e-RDKK yang penyusunannya dilakukan oleh para kelompok tani dan didampingi oleh penyuluh pendamping.

Alur distribusi dilakukan oleh pengecer resmi ( selaku Penyalur di Lini IV) dan jenis pupuk yang di subsidi pada tahun 2023 pemerintah pusat membatasi pupuk subsidi menjadi hanya dua yaitu urea dan NPK saja. Pemerintah menetapkan kebijakan dimana pupuk subsidi hanya dikhususkan untuk petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan yakni padi dan jagung, kedelai. Hortikultura yakni cabai, bawang merah, bawang putih, serta perkebunan yakni kakao, tebu, dan kopi. Pengecer resmi harus menjual pupuk tersebut kepada petani yang ada pada system e-RDKK dan sesuai dengan ketentuan HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. Harge Eceran Tertinggi (HET) dapat dilihat pada Tabel 2 :

Tabel 2 Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 2022

Jenis Pupuk	Harga (Rp/kg)	Harga (Rp/karung)*
Urea	2.250	112.500
ZA	1.700	85.000
SP-36	2.400	120.000
Phonska	2.300	115.000
Petroganik	800	32.000

Sumber Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2020

\*) 1 karung = 50 kg

Sedangkan untuk pupuk non subsidi yang beredar di masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Harga Eceran Pupuk Non Subsidi

Jenis Pupuk	Harga (Rp/kg)	Harga (Rp/karung)*
Urea	5.900,-	290.000
SP-36	5000,-	245.000
ZA	3000 – 5.900,-	150.000 – 295.000
NPK Mutiara	10.000	500.000
NPK Pak Tani	13.000	650.000

\*) 1 karung = 50 kg

Meskipun dengan adanya peraturan dan pedoman yang menyertai kebijakan subsidi pupuk ini, ternyata dilapangan masih mengalami banyak masalah. Salah satu masalahnya adalah ketertarikan petani Kota Tasikmalaya terhadap kebijakan subsidi pupuk karena mindset petani bahwa adanya penyusunan e-RDKK terlalu rumit karena petani tidak ingin berurusan dengan perbankan. Maka dari itu diperlukan solusi dalam menghadapi hal tersebut.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya koordinasi antara penyuluh dan petani dimana masih ada petani yang belum tercatat di e-RDKK dan kurangnya koordinasi dengan pihak Bank Mandiri dimana bank tersebut merupakan bank yang menerbitkan kartu tani. Masalah dan hambatan yang timbul dari petani dimulai dari Kelompok Tani yang sulit diajak bekerja sama untuk penyusunan RDKK dan kemudian akhirnya penyusunan dilakukan oleh penyuluh pertanian, sehingga banyak petani yang tidak yakin dengan adanya pemberlakuan Kartu Tani untuk membeli pupuk.

Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kawalu mengungkapkan hambatan yang dihadapi terkait dengan realisasi pupuk subsidi yaitu adanya pengurangan dosis pupuk subsidi oleh pemerintah menyebabkan realokasi pupuk subsidi mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena disetiap kartu tani itu sudah sesuai dengan data RDKK dimana petani mendapatkan pupuk sesuai dengan lahan yang digarapnya, jika dalam satu kartu tani terbagi, tidak akan sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu.

Adapun masalah yang datang dari pihak Bank Mandiri selaku Bank yang menerbitkan kartu tani, yang mengalami kendala pada saat pendataan kartu tani yang sudah aktif dan yang belum, maka dari itu hal tersebut menghambat pihak penyuluh untuk melanjutkan realisasi penggunaan kartu tani. Apalagi Kota Tasikmalaya sudah diharuskan menggunakan kartu tani untuk pembelian pupuk

bersubsidi sehingga petani yang belum mempunyai kartu tani terpaksa harus membeli pupuk non subsidi hal tersebut tentunya mempengaruhi pada pendapatan petani.

Realisasi pupuk subsidi harus sesuai dengan yang diajukan oleh petani, karena pupuk merupakan suatu input yang dapat menunjang produktivitas padi. Balai Penyuluh Pertanian menyebutkan bahwa kebijakan subsidi pupuk ini belum bisa dikatakan efektif dikarenakan kesadaran petani. Maka dari itu diperlukan beberapa solusi dalam menghadapi permasalahan terkait subsidi pupuk.

Adapun tabel realisasi penyaluran subsidi pupuk di Kelurahan Karanganyar :

Tabel 4 Realisasi Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Karanganyar

No	Nama Desa	Urea (kg)	NPK(kg)	NPK formulaKhusus
1.	Karsamenak	70.311	52.560	0.00
2.	Cilamajang	46.656	34.164	0.00
3.	Gunung Tandala	62.847	49.500	0.00
4.	Urug	45.357	34.755	0.00
5.	Tanjung	39.405	34.113	1.950
6.	Cibeuti	83.838	61.191	0.00
7.	Karanganyar	119.811	87.996	0.00
8.	Talagasari	55.557	41.514	0.00
9.	Leuwiliang	45.618	33.444	0.00
10.	Gunung Gede	30.600	26.763	0.00
	Total	600.000	456.000	1.950

Sumber : BPP Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4 untuk distribusi Urea yang menerima jumlah terbesar yaitu Karanganyar dikarenakan desa tersebut memiliki lahan pertanian yang luas dan kebutuhan yang tinggi akan pupuk urea. Untuk desa yang menerima urea terkecil yaitu Gunung Gede perbedaan tersebut diakibatkan luas lahan yang lebih kecil dan tingkat kebutuhan pupuk yang berbeda. Total distribusi urea untuk seluruh desa yaitu sebesar 600.000 kilogram, hal tersebut menunjukkan adanya alokasi yang signifikan untuk memastikan bahwa semua petani mendapatkan pupuk yang dibutuhkan dan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Distribusi NPK yang menerima realisasi pupuk subsidi terbesar yaitu kelurahan Karanganyar dikarenakan desa tersebut memiliki lahan pertanian yang luas dan kebutuhan pupuk NPK yang tinggi. Perbedaan jumlah distribusi antar desa menunjukkan adanya variasi kebutuhan. Maka dari itu terdapat beberapa hal yang harus dipahami dan dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal dalam produktivitas pertanian.

Kebijakan subsidi pupuk dinilai memberikan dampak positif dalam

meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani khususnya tanaman pangan (Susila, 2010). Kebijakan subsidi pupuk bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan subsidi input dengan menentukan HET pupuk bersubsidi. Kebijakan subsidi pupuk terbukti mampu meningkatkan luas panen dan output padi nasional (Hermawan, 2014); Santoso, 2015).



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Gambar 1 Data Produktivitas Padi Kota Tasikmalaya 2016-2021

Kebijakan pupuk subsidi yang dijalankan oleh pemerintah idealnya harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produktivitas padi dan membantu kesejahteraan petani, sesuai dengan tujuan diterapkannya kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan subsidi yang sesuai dengan 6 tepat harus mampu memberikan sumbangsih yang optimal terhadap peningkatan produksi padi.

Produktivitas padi di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2019, bahkan pada tahun 2018-2019 produktivitas padi di Kota Tasikmalaya cenderung mengalami penurunan dikarenakan perubahan cuaca dan perubahan pola curah hujan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi dan hasil panen, namun pada tahun 2020 - 2021 terdapat *trend positive* dengan peningkatan produktivitas sebanyak 12,95 persen dibandingkan dengan produktivitas padi tahun 2019 dikarenakan cuaca yang mendukung dan manajemen lahan yang baik kemudian dilakukannya program pelatihan dan penyuluhan pertanian secara rutin (Gambar 1)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Gambar 2 Data Produktivitas Padi Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Tasikmalaya terdiri dari 10 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kawalu yang memiliki produktivitas tertinggi ke dua di Kota Tasikmalaya yakni 51,7 ton/ha (BPS Kota Tasikmalaya, 2019). Produktivitas Padi pada tahun 2023 dengan hasil produksi sebesar 64.647 ton dan produktivitas padi mencapai 69,42 kw/ha dalam luas panen sebesar 9313 ha (Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, 2023). Efektivitas kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Kawalu sebagai salah satu kebijakan di bidang pertanian idealnya mendorong pada produksi padi khususnya dalam peningkatan produktivitas padi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan indikator enam tepat (harga, jumlah, jenis, tempat, waktu dan mutu) penentu keberhasilan subsidi pupuk?
2. Bagaimana tingkat produktivitas padi di Kelurahan Karanganyar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan indikator enam tepat.
2. Menganalisis tingkat produktivitas padi di Kelurahan Karanganyar?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman serta informasi yang berguna terkait efektivitas kebijakan subsidi pupuk
2. Bagi petani, sebagai sumber informasi dan agar petani dapat mengembangkan usahatannya dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas padi.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk terus meningkatkan dan memperbaiki efektivitas kebijakan subsidi pupuk Indonesia pada umumnya dan Kota Tasikmalaya Desa Kawalu pada khususnya, demi terciptanya pertanian yang sejahtera.